

UNY KUKUHKAN DUA GURU BESAR

Tanaman Bisa Gantikan Minyak Bumi

SLEMAN (KR) - Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) mengukuhkan dua guru besar di bidang Ilmu Kimia, Sabtu (25/7). Prof Dr Eli Rohaeti MSi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA UNY) menjadi guru besar ke-156, sedangkan Prof Dr Sri Handayani MSi juga dari FMIPA UNY menjadi guru besar ke-157.

Dalam pidatonya berjudul 'Pengembangan Material Polimer Berbasis Sumber Daya Alam Lokal untuk Mendukung Perkembangan Kimia Polimer Ramah Lingkungan', Prof Eli mengatakan, sudah banyak penelitian tanaman sebagai pengganti minyak bumi untuk bahan bakar maupun bahan mentah dalam pembuatan polimer. Hal ini lantaran tanaman merupakan bahan yang dapat diperbarui dan mudah terdegradasi.

"Namun sayang, hingga kini masih banyak tanaman yang harus diimpor. Bahan baku industri seyogianya dikembangkan dari bahan berbasis pertanian dalam upaya mengurangi ketergantungan bangsa Indonesia dengan bahan impor," ungkap Prof Eli.

Prof Dr Sri Handayani MSi dalam pidato pengukuhan yang diberi judul 'Pengembangan Sintesis Organik dan Uji Potensinya sebagai Senyawa Aktif: Menuju Ekonomi Hijau', mengungkapkan, desain sintesis yang menghasilkan reaksi tanpa limbah perlu segera dilakukan. "Ini bisa meningkatkan ekonomi hijau. Oleh karena itu, kami mulai menggeser fokus riset menuju reaksi yang meminimalkan limbah serta menggunakan bahan alam terbarukan," tandasnya. **(R-1)-o**

UIN Suka Tambah Dua Doktor



Dr Rama Kertamukti dan Dr Abdul Qoyum.

YOGYA (KR) - UIN Sunan Kalijaga (Suka) Yogyakarta kembali menambah amunisi doktor. Kali ini, dua doktor langsung memperkuat barisan akademisi UIN Sunan Kalijaga tersebut. Keduanya, Dr Rama Kertamukti, sukses meraih gelar doktor di Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan disertasi berjudul 'Hasrat Pamer Diri Kelas Menengah Indonesia di Instagram: Media Baru, Identitas Dan Masyarakat Jaringan' dengan Promotor

Prof Dr Heru Nugroho dan Dr S Bayu Wahyono. Kehadiran Rama memperkuat jajaran Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selain itu, Dr Abdul Qoyum SEI MSc Fin menambik kekuatan akademik Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) UIN. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tersebut berhasil meraih gelar Doktor bidang Ekonomi Islam setelah mempertahankan disertasi-

nya 'The Environmental, Social, And Governance (ESG) Criteria And Its Impact On The Portfolio Performance: In Search Of Integration Between Islamic And ESG Screening In Indonesia' pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof Dr Phil Al Makin SAG MA mengaku bangga dengan prestasi tersebut. Pihaknya berharap kualitas dan mutu pendidikan di UIN Sunan Kalijaga makin meningkat.

Dr Abdul Qoyum mempertahankan karya disertasi berjudul di hadapan Tim Penguji Prof Noorhaidi Hasan, Dr M Nur Ichwan, Prof Hadri Kusuma, Dr Ibnu Qizam, Dr Misnen Ardiansyah, Dr Syafiq M Hanafi, Dr Abdul Moin Phd, Dr M Fakhri Husein. Ia berhasil menyelesaikan studi doctoral dengan waktu singkat. **(Feb)-o**

HASIL SURVEI 51 PTS DI DIY

19,61% Tak Alami Masalah Keuangan

YOGYA (KR) - Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mengalami dampak yang cukup signifikan dalam pelaksanaan kegiatan di masa pandemi Covid-19. Selain proses belajar-mengajar yang berubah, persoalan penerimaan mahasiswa baru juga banyak membuat pesimisme. Karena kehidupan PTS juga ditentukan dengan jumlah mahasiswa, sehingga banyak cara ditempuh untuk mengatasi solusi masalah keuangan.

"Tak bisa diingkari, 35,29 persen menggunakan saldo PT, 27,45 persen minta yasan dan hanya 19,61 persen PTS yang tidak mengalami masalah keuangan. Namun 3,92 persen PTS terpaksa harus menjual aset dan 5,38 persen meminjam ke pihak ketiga," paparkan Ketua Aptisi Wilayah V, Prof Fathul Wahid PhD mengomentari hasil survei 'Kesiapan PTS di DIY Menyongsong Tatanan Baru Bakda Pandemi Covid-19',

Minggu (26/7).

Survei dilakukan di 51 PTS awal Juli lalu dengan 403 program studi (prodi), 5.225 dosen dan 3.894 tenaga pendidik. Hal yang harus disyukuri, ujar Ketua Aptisi Wilayah V ini, kondisi keuangan sebagian besar PTS di DIY ini, bagus. Bahkan 86,3 persen masih membayar gaji dan tunjangan seperti sebelum pandemik. Meski mungkin menurun, ada banyak pengeluaran lain yang harus dan bisa ditunda. Sementara 13,7 persen melakukan pemotongan gaji/tunjangan dan hanya 3,9 persen yang

menunda membayar gaji/tunjangan.

Di masa penerimaan mahasiswa baru (PMB) ini, kondisi PTS di Wilayah V pun masih terbilang bagus. "Dari 51 PTS yang disurvei, tidak ada yang tidak menerima mahasiswa baru. Minimal keterisian 2,5 persen dan maksimum 85 persen," tandasnya.

Namun angka ini masih berubah karena PMB masih berlangsung. Fathul menyebutkan, banyak yang tidak terduga dalam masa pandemi ini. Karena ada prodi yang mendapatkan banyak peminat. **(Fsy)-o**

Sekolah Masih Kurang Beradaptasi

YOGYA (KR) - Masa pandemi Covid-19, sekolah harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Bentuk adaptasi itu, adanya kesiapan guru, siswa maupun orangtua yang terkait dengan pembelajaran daring. Pembelajaran online yang menjadi acuan, jika sebelumnya yang aktif guru, sekarang adalah siswa. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan kognitif, sehingga bisa menentukan apa yang dipelajari siswa. Sekolah melakukan adaptasi dengan perencanaan pembelajaran yang meliputi, planning, monitoring, actuating dan reflecting.

Hal tersebut ditegaskan Prof Dr Dwi Sulisworo MT, Guru Besar bidang Teknologi Pembelajaran dari Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dalam Webinar Pendidikan bertema 'Sekolah Siaga, Sekolah Berdaya Manajemen Lembaga Pendidikan di Masa New Normal', Jumat (24/7) lalu.

Webinar ini diselenggarakan mahasiswa semester 3 Manajemen Pendidikan (MP) Pascasarjana UAD. Hadir pula sebagai narasumber Dr Suyatno MPd (Kaprosdi MP-UAD), Dr Dian Hidayati MM (Dosen MP-UAD) dan praktisi pendidikan Abdul Gani SPdI, Ulfa Dian Citra Resmi SPsSD, Maya Veri Oktavia.

Menurut Prof Dwi Sulisworo, selama pandemi Covid-19, masih banyak sekolah belum melakukan adaptasi secara cepat. "Menjadi sekolah siaga, sekolah yang berdaya membutuhkan sinergi, sekolah, siswa dan orangtua," ujarnya, kemarin. Sedangkan Suyatno mengatakan, menjadi guru penggerak di masa pandemi menyebabkan adanya perubahan mendasar dalam kehidupan. Kompetensi guru sangat dibutuhkan untuk melakukan adaptasi, ide baru yang bermanfaat, kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru. **(Jay)-o**

DIKTI-HUAWEI TEKEN KERJA SAMA Indonesia Butuhkan Talenta Digital

JAKARTA (KR) - Indonesia membutuhkan banyak talenta digital di masa depan. Ekonomi digital saat ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, dibutuhkan SDM yang berkompeten di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) demi menjawab kebutuhan di era revolusi industri 4.0.

Hal itu dikemukakan Dirjen Dikti Nizam dalam acara menandatangani perjanjian kerja sama dengan Vice President of Public Affairs and Communications Huawei Indonesia Qijian Ken. Penandatanganan ini berlangsung secara tatap muka di Gedung D Kompleks Kemendikbud, Sabtu (25/7).

Kerja sama ini untuk mengembangkan proses transformasi digital di perguruan tinggi (PT) serta meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa di bidang TIK. "Kebutuhan terhadap talenta-talenta digital sangat tinggi dan dicari perusahaan, sementara SDM kita belum banyak, sehingga penguatan talenta digital menjadi fokus untuk pengembangan ekonomi kita ke depan," kata Nizam.

Kerja sama yang berlangsung selama dua tahun ini meliputi lima area, yakni pelatihan TIK bagi dosen dan mahasiswa, kompetisi TIK, program magang mahasiswa, penerapan platform e-learning serta join riset di bidang ICT, cloud computing, big data hingga AI.

Ditjen Dikti menargetkan ada 200 PT yang bekerjasama dengan Huawei hingga akhir tahun dan sekitar 800 perguruan tinggi pada tahun ke dua. Nizam berharap, dengan adanya kerja sama ini dapat mempererat hubungan antara dunia industri dengan perguruan tinggi sejalan semangat merdeka belajar yang dicanangkan Kemendikbud. **(Ati)-o**

EKONOMI

KONSUMSI RUMAH TANGGA TUMBUH MELAMBAT

APBN Dukong Pemulihan Ekonomi Daerah

Capaian APBN 2019 Sangat Baik

JAKARTA (KR) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan tahun 2019. Predikat ini merupakan yang kesembilan kalinya diperoleh secara berturut-turut sejak tahun 2011.

"Dalam menyelenggarakan APBN, Kemenko Perekonomian berkomitmen untuk mengedepankan tata kelola yang baik (good governance) agar seluruh kebijakan dapat berdampak positif dan optimal demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta, Jumat (24/7).

Dikatakan, pelaksanaan APBN 2019 dan tantangan di tahun 2020, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19. Secara umum, kebijakan penggunaan belanja di tahun 2019 diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dan produktif. Hal ini dilakukan melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, mendorong perbaikan iklim investasi dan peningkatan daya saing, serta stabilitas harga pangan.

"Di tahun 2019 yang penuh tantangan bagi perekonomian nasional, kita patut bersyukur pelaksanaan APBN 2019 telah ditutup dengan capaian yang sangat baik. Namun, di tahun 2020 ini menjadi tahun yang berat dan penuh tantangan bagi kita semua," ujarnya.

Pandemi Covid-19, memberikan tekanan besar pada keuangan negara dan perekonomian nasional karena berbagai macam faktor. **(Lmg)-o**

YOGYA (KR) - Bank Indonesia (BI) memproyeksi pertumbuhan ekonomi DIY pada Triwulan II 2020 berkontraksi sebesar 0,21 persen setelah sebelumnya minus 0,17 persen pada Triwulan I 2020. Untuk itu, dukungan kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat diperlukan guna mendorong dan mendukung pemulihan perekonomian di daerah agar pertumbuhan ekonomi DIY tidak terjun bebas akibat dampak pandemi Covid-19.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan DIY Heru Nugroho mengatakan, kontraksi pertumbuhan ekonomi DIY 2020 diprediksi didorong hampir sebagian besar komponen utama permintaan. Terutama konsumsi rumah tangga yang merupakan pangsa terbesar dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY diperkirakan tumbuh melambat.

"Efisiensi anggaran baik

dari pemerintah maupun swasta menyebabkan aktivitas Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di DIY cenderung rendah. Alokasi APBN Perubahan 2020 untuk transfer ke daerah menurun dan pendapatan daerah dari pajak diperkirakan turun," tutur Heru di kantornya, kemarin.

Heru menyampaikan, pelepasan pembatasan aktivitas masih akan dilakukan sangat hati-hati dan bersifat *wait and see*, meli-

hat potensi penyebaran pandemi Covid-19 ke depan. Di samping itu, adanya potensi kembali dilakukan pembatasan aktivitas apabila terjadi lonjakan penyebaran Covid-19 pada masa transisi era kenormalan baru. "Agar pertumbuhan ekonomi di

daerah tidak terpuruk dan mengalami resesi, APBN memberikan dukungan dana guna pemulihan ekonomi kepada Pemda," tandasnya.

Dukungan APBN bagi pemulihan ekonomi daerah tersebut, dijelaskan Heru, antara lain penyiapan tam-

bahan dukungan berupa Dana Insentif Daerah (DID) untuk mendukung percepatan pemulihan perekonomian di daerah. Kemudian penyediaan fasilitas pinjaman program kepada Pemda untuk mendukung pemulihan ekonomi. **(Ira)-o**



Struktur Ekonomi DIY

UKURAN suksesnya pembangunan ekonomi di suatu wilayah selain pertumbuhan ekonomi adalah perubahan struktur ekonomi wilayah tersebut. Hal tersebut dilandasi oleh pemikiran dua ekonom yaitu Hollis Chenery dan Syrquin (1975) berdasar penelitiannya di berbagai negara tahun 1950-1970. Penelitian tersebut menemukan bahwa negara yang bergantung ekonominya pada sektor tersier (jasa-jasa) pendapatan perkapitanya paling tinggi dibanding yang bergantung pada sektor sekunder (industri) dan sektor primer (pertanian dalam arti luas dan pertambangan). Yang bergantung pada sektor primer pendapatan perkapitanya paling rendah karena nilai tambah produksi sektor primer memang rendah dan tergantung pada alam. Kesimpulannya, jika suatu negara ingin maju, struktur ekonominya harus diubah dari dominasi sektor primer ke dominasi sektor sekunder dan terakhir ke dominasi sektor tersier.

LAPANGAN USAHA	2016		2017		2018		2019	
	PDRB	TK	PDRB	TK	PDRB	TK	PDRB	TK
1 Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan	10,42	23,27	10,02	22,01	9,78	20,40	9,37	19,01
2 Pertambangan, Penggalian	0,54	1,04	0,52	0,74	0,53	0,89	0,51	0,74
3 Industri Pengolahan	13,23	12,83	13,13	15,83	12,99	16,38	12,85	17,05
4 Listrik, Gas, Air Minum	0,23	0,21	0,25	0,17	0,24	0,53	0,24	0,36
5 Bangunan	9,35	6,55	9,49	7,47	10,28	7,58	11,11	6,73
6 Perdagangan Besar, eceran, Rumah Makan, Hotel	18,70	28,89	18,91	26,97	18,81	28,37	18,82	28,39
7 Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	13,83	3,68	13,90	3,61	13,85	4,37	13,62	4,96
8 Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah & Jasa Perusahaan	12,04	2,78	11,95	3,84	11,89	7,56	12,02	1,61
9 Jasa Kemasyarakatan	21,66	20,75	21,83	19,37	21,63	13,92	21,46	21,16
JALAN TOTAL	100							

Sumber: BPS dan Bappeda Provinsi DIY, diolah Grafik: Arko

Dispar DIY Simulasi Travel Agent dan MICE

YOGYA (KR) - Dinas Pariwisata (Dispar) DIY melakukan simulasi Standard Operating Procedure (SOP) protokol kesehatan bagi travel agent dan Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) menuju Pranatan Anyar Plesiran Jogja, 24 hingga 25 Juli 2020. Simulasi ini guna memastikan SOP protokol kesehatan terimplementasi pada semua *sight* yang dipakai dan sudah menerapkan uji coba operasional terbatas.

Kepala Dispar DIY Singih Raharjo menyampaikan, pelaku industri pariwisata di DIY terus berupaya berbenah diri dan menyipkan segala sesuatunya sesuai SOP protokol kesehatan dalam rangka menu-



Simulasi SOP protokol kesehatan bagi wisatawan yang berkunjung di Kraton Yogyakarta.

ju masa Pranatan Anyar Plesiran Jogja atau era kenormalan baru. Dispar DIY bekerjasama GIPI DIY baik ASITA, PHRI dan HPI menggelar simulasi serupa yang dikemas dalam agenda paket wisata 2 hari 1 malam. "Selain memas-

tikan implementasi SOP protokol kesehatan, simulasi ini pun guna mensinkronkan SOP semua stakeholder agar kenyamanan berwisata bisa terlaksana dengan baik," kata Singih di Yogyakarta, Sabtu (25/7). **(Ira)-o**